

AKSES KONTROL PUBLIK TERHADAP KEUANGAN DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI TINGKAT LOKAL

Oleh :

Zudan Arif Fakrulloh

ABSTRACT

A good administration is a result of mass social construction, so that it always tied up with context, time and culture support. Instead of an output, it is also a synthetic process of executive, legislative and community behavior. Transparency factor and public control of house of representative financial handling is a very essential point to be the good local administration. As a local control institution, the house of representative should also be controlled. A widely opened channel, therefore, should be provided for public control access to the house of representative.

Keywords : Public control, house of representative financial handling, the good local administration

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang telah digulirkan sejak tanggal 1 Januari tahun 2001 membuka harapan dan peluang tumbuhnya kreativitas, diskresi dan kebebasan bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun wilayahnya. Peluang ini harus ditanggapi secara positif oleh masyarakat, eksekutif dan legislatif di daerah. Tanggapan yang positif ini diperlukan agar tidak lagi timbul kemungkinan berbaliknya pendulum ke arah sentralisasi.

Salah satu titik sentral dalam otonomi daerah yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat, eksekutif maupun legislatif di daerah adalah masalah manajemen APBD khususnya yang terkait dengan

kedudukan keuangan DPRD. Hal ini perlu disoroti karena adanya kecenderungan yang merata di seluruh Indonesia bahwa keuangan DPRD jauh lebih besar dari ketentuan yang sudah digariskan dalam PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD.

DPRD sebagai lembaga kontrol di tingkat lokal memegang peran yang besar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, harus dihindari perbuatan-perbuatan yang dapat menghambat penciptaan proses tersebut terutama yang berasal dari lembaga DPRD itu sendiri. Walaupun sebagai lembaga kontrol, DPRD harus tetap dikontrol. Dalam konteks inilah diperlukan mekanisme kontrol dan model transparansi yang